

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam bahasa Arab *misykat* berarti cahaya (lentera). Dengan arti tersebut secara filosofis koperasi ini diharapkan mampu menjadi penerang dari kegelapan menuju cahaya kesejahteraan sebanyak-banyaknya anggota.

Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) pada tanggal 22 April 2002 merintis suatu program pemberdayaan ekonomi umat yang dinamakan program *Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)* dan pada tanggal 22 April 2003 program *Misykat* ini diresmikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar di Gedung Daarul Ilmi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. Selama lima tahun ini program *Misykat* menjadi sebuah program unggulan DPU DT.

Seiring dengan perjalanan, perkembangan, tuntutan zaman dan pemandirian program-program yang ada di DPU DT, maka di tahun 2009 program *MiSykat* ini didorong untuk mandiri dengan memiliki berbadan hukum sendiri (*independent*) dan dapat membiayai operasional lembaganya sendiri. Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Bapak H. Asep Hikmat pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 di ruang rapat DPU DT Bandung, maka secara resmi terbentuklah KSU *Misykat*. Aktifitas utama KSU *Misykat* ini adalah menyelenggarakan kegiatan perniagaan dalam upaya mensejahterakan anggota melalui unit/divisi Niaga dan memberdayakan dhu'afa melalui unit/divisi Pembiayaan.

Untuk pencapaian visi dan misi dan menjalankan misinya, Koperasi Serba Usaha (KSU) *Misykat* harus menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai inti yang diyakini. Visi KSU *Misykat* yaitu Menjadi koperasi mandiri, mensejahterakan anggota dan berperan aktif mendukung pencapaian visi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid. Dengan misi yaitu mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian; meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat menuju kesejahteraan anggota; dan

berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat berskala mikro. Serta memiliki tujuan yaitu sebagai wujud partisipasi aktif pengembangan ekonomi umat yang berwawasan syariah dengan mengedepankan profesionalitas; mendapatkan SHU yang besar untuk kesejahteraan anggota; dan mendapatkan bagi hasil, margin yang halal untuk keperluan operasional lembaga.

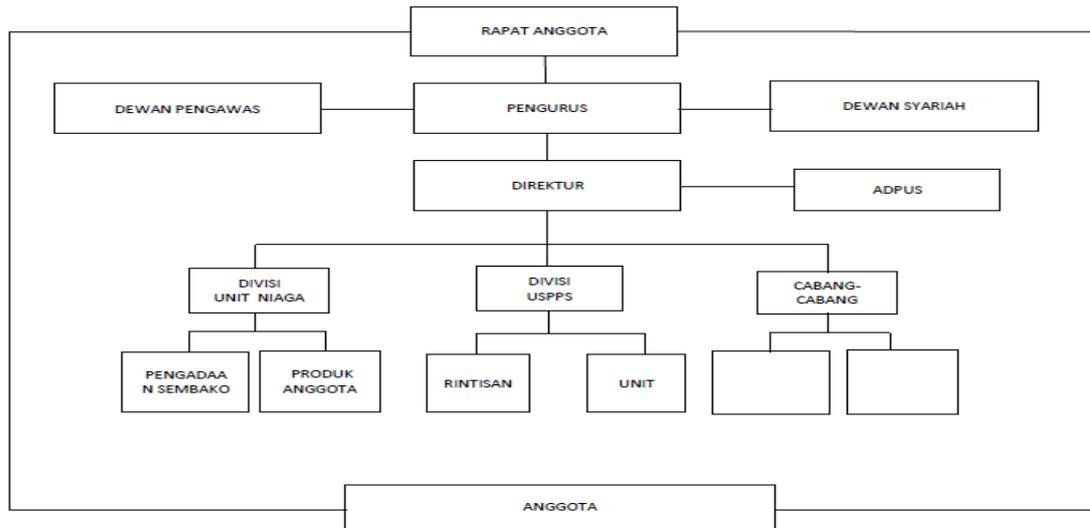


**Gambar 1.1**

**Logo Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat**

*Sumber : Dokumen pribadi KSU Misykat*

Setiap Koperasi di bentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menentukan macam – macam dan luasnya pekerjaan yang dilakukan. Karena itu diperlukan suatu desain organisasi atau struktur organisasi wewenang, dan tanggung jawab setiap elemen dalam organisasi tersebut. Koperasi Serba usaha (KSU) Misykat Bandung. Pimpinan tertinggi di Koperasi Serba usaha (KSU) Misykat Bandung, yaitu rapat anggota, serta terdapat dewan pengawas, pengurus, dan dewan syariah untuk menopang rencana untuk mencapai tujuan yang sudah di buat dan di rencanakan oleh perusahaan.



**Gambar 1.2**

**Struktur Organisasi Koperasi Serba usaha (KSU) Misykat**

*Sumber : Dokumen pribadi KSU Misykat*

Keterangan :

**PENGURUS**

- a. Ketua : Iwan Firmansyah, S.Sos.
- b. Sekretaris : Cecep Iwan Setiawan, S.Pd.
- c. Bendahara : Hani Hanifah, S.Th.I.

**PENGAWAS**

- a. Ketua : Herman, S.Sos
- b. Anggota : Cucu Hidayat, Dede

**DEWAN SYARIAH**

- a. Mengikuti Dewan Syariah DPU DT

**PENGELOLA**

- a. Manajer : Iwan Firmansyah, S.Sos.
- b. Man. Ops : Hani Hanifah, S.Th.I.
- c. Kadiv. Niaga : Cecep Iwan Setiawan, S.Pd.
- d. Kadiv. USPPS : Rustandi, S.Pd.I.
- e. Staff Staff Ops : Iis Jamilah, Siti Alfiah, Widia, Siti Herlina
- f. Staff Niaga : Sidik

- g. Staff USPPS : Ridwan, Dodi, Dadang, Fauzan, Asep, Ratna Komala, Daliahwati

#### TUGAS PENGURUS

1. Mengelola usaha koperasi
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

#### TUGAS PENGELOLA

1. Manajer KSU Misykat : Mengatur dan memastikan semua elemen menjalankan fungsinya masing-masing guna mencapai tujuan lembaga.
2. Manajer Operasional : Memimpin dan mengatur operasional lembaga agar terjadi keseimbangan lembaga.
3. Kadiv. Niaga : Memimpin Unit Niaga guna menjadi unit usaha yang ikut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan lembaga dan menjadi sarana pemberdayaan produk-produk anggota binaan Misykat.
4. Kadiv. USPPS : Memimpin Unit Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (USPPS) untuk memperluas sebaran wilayah, peningkatan jumlah anggota layanan, dan memastikan program USPPS berjalan dengan aturan.
5. Staff ADMP : Menginput data keuangan anggota berdasarkan data lapangan.
6. Staff Teller : Mengatur arus kas harian lembaga (pemasukan, pencairan, dsb).
7. Staff TPL : Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) memberikan layanan keuangan dan pendampingan langsung kepada anggota.

Misykat sendiri, merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang kurang mampu yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah; yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari Misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Namun sebelumnya, kaum dhuafa dan miskin diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang akan diterimanya nanti. Mereka tiap pekan mengikuti kegiatan pendampingan yang dipandu seorang staf Misykat.

Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu. Mereka yang menjadi anggota Misykat ini punya kewajiban untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan Misykat. Hingga kini, Misykat telah menjadi program pemberdayaan (unggulan) Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) yang sudah tersebar di beberapa Wilayah Bandung seperti Wilayah Tegallega dan Mohamad Toha.

Dalam pemberdayaannya, di wilayah Tegallega dan Mohamad Toha terdapat beberapa UMKM yang bergerak di bidang jasa, kuliner, pakaian, dan konveksi. Namun, UMKM yang terdapat di wilayah Tegallega dan Mohamad Toha ini belum diperhatikan dengan baik sehingga masih perlu adanya pemberdayaan untuk dapat berkembang dan naik kelas. Di Misykat sendiri dalam melakukan pemberdayaan UMKM dibagi dalam bentuk majelis atau kelompok yang terbagi sesuai dengan lingkungan wilayahnya contohnya seperti satu Rukun Tetangga (RT) yang di bentuk menjadi satu majelis UMKM untuk melakukan pemberdayaannya. Wilayah Tegallega dan Mohamad Toha merupakan Wilayah yang sudah menjadi bagian dari pemberdayaan misykat selama kurang lebih dua tahun yang terdiri dari 9 majelis dengan masing-masing wilayah Tegallega 6 majelis dan Mohamad Toha 3 majelis.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pada saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mulai membuka wawasan dan mencoba untuk berwirausaha, pelaku usaha berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, karyawan hingga ibu rumah tangga. Hal ini mereka lakukan semata-mata hanya untuk menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan KADIN (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 58,64 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Berikut data perkembangan UMKM di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Pangsa Pasar</b>
2012	56.534.592	99.99%
2013	57.859.721	99.99%
2014	57.906.384	99.99%
2015	58.114.615	99.99%
2016	58.639.247	99.99%

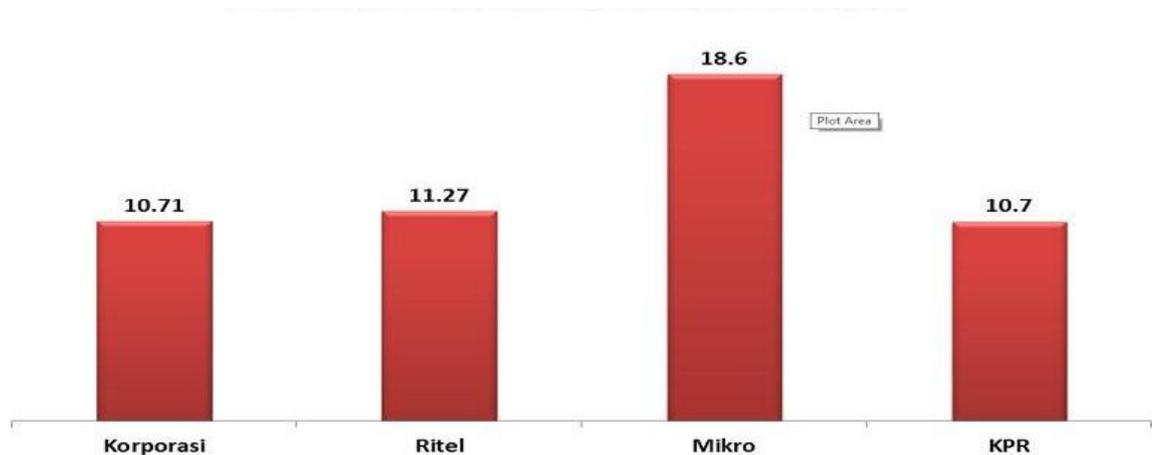
*Sumber* : departmen koperasi dan umkm, 2017

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank BI, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses

pembiayaan melalui perbankan. Sebanyak 56,5 juta UMKM, yang mendapatkan kredit sekitar 15,6 juta unit atau hanya 27,6%. Artinya, sekitar 40 juta UMKM, yang hampir semuanya tergolong usaha mikro, tidak pernah mendapatkan dukungan permodalan dari bank. Para pelaku UMKM yang tidak pernah mendapatkan kredit dari bank antara lain sebagian besar dari para petani, nelayan, tukang ojek, buruh bangunan, penjual warteg dan sebagainya. Mereka umumnya berusaha dengan memutar uang sendiri, uang pinjaman dari tetangga dan saudara, atau meminjam dari tengkulak dengan bunga mencekik leher. Pendek kata, pelaku usaha mikro tidak memiliki dana untuk mengembangkan usaha. Akhirnya, usaha mereka stagnan, hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dan OJK sejauh ini cukup gencar mendorong penyaluran kredit ke sektor mikro. Salah satu program pemerintah adalah memberikan subsidi bunga untuk kredit mikro yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga KUR saat ini dipatok sebesar 9 persen per tahun. Jika dibandingkan bunga pasar untuk kredit mikro yang sekitar 19 persen per tahun, maka ada selisih sekitar 10 persen poin. Selisih itulah yang merupakan subsidi dari pemerintah.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Suku Bunga Kredit 2016 (Persen)**



*Sumber* : Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan sedang gencar mempromosikan program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini bertujuan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan

penggunaan sarana teknologi informasi. Dengan strategi ini, bank bisa menjangkau pelaku-pelaku usaha mikro di berbagai pelosok Indonesia. Awalnya, pelaku usaha mikro digandeng untuk menjadi nasabah bank dengan cara menabung. Lama kelamaan, jika dinilai memiliki prospek usaha yang bagus, bank akan menawarkan kredit kepada pelaku usaha mikro bersangkutan. Namun, pemberian kredit belum cukup untuk menciptakan pelaku-pelaku usaha mikro yang tangguh. Pemerintah juga sedang intensif memberikan pelatihan manajemen, keuangan, akses pasar kepada mereka. Dengan memberdayakan UMKM, khususnya usaha mikro, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat signifikan.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan Dunia Internasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, di berbagai belahan dunia isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) tengah hangat diperbincangkan. Perhatian khusus ini tak lepas dari adanya kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk, serta perkembangan pesat pasar keuangan. Pemahaman akan *financial literacy* saat ini semakin diperlukan demi terciptanya penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik. Masyarakat dituntut bukan hanya menguasai akan materi namun juga harus bisa menguasai praktek demi mengikuti perkembangan pasar keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan tidak salah. Selain itu pengelolaan keuangan yang baik akan mampu menyejahterakan hidup individu itu sendiri.

Literasi keuangan merupakan kemampuan dari individu tersebut dalam pengaplikasian pengelolaan keuangan, baik dalam mendapatkan, dan mengevaluasi informasi yang umumnya diperuntukan untuk pengambilan keputusan dengan melihat konsekuensi yang diterima. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Rancangan Peraturan OJK 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Kurangnya *financial literacy* dapat mengakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan serta menghambat keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Sindo, 4 oktober 2017) literasi keuangan masyarakat dan

pengelolaan keuangan bagi setiap keluarga Indonesia merupakan hal yang penting. Pasalnya, keluarga merupakan salah satu pilar perekonomian dimana kesehatan keuangan keluarga akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan keuangan negara secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat, akan menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan dan memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan (*financial shock*). Pembangunan nasional suatu negara hanya akan berjalan efektif jika dilaksanakan secara inklusif, yang selain menciptakan peluang ekonomi baru, juga menjamin aksesibilitas yang sama bagi seluruh segmen masyarakat.

Indonesia dengan tingkat literasi keuangan yang rendah terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan peningkatan literasi keuangan untuk ibu rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai agenda besar dalam membangun dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional yang kontributif dan inklusif. Penyebabnya, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilakukan OJK pada 2013, tingkat literasi keuangan UMKM mencapai 15,7% sementara tingkat inklusi keuangan UMKM hanya 53,3 persen. Jumlah tersebut atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 21,8 persen (literasi) dan 59,7 persen (inklusi keuangan).

Peningkatan yang akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan pada hasil survei OJK tahun 2013 yang menunjukkan rendahnya literasi dan utilitas di sektor keuangan. Edukasi literasi keuangan bagi UMKM menjadi suatu program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk lembaga keuangan dan UMKM sebagai prioritas sasaran edukasi literasi keuangan. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi usaha kecil tersebut. Akses terhadap layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, fasilitas pembiayaan dan transaksi keuangan lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di suatu

daerah maka diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

Menggunakan produk lembaga keuangan, diperlukan adanya literasi keuangan yang baik dalam mengelola dan mengatur keuangan yang benar sehingga lembaga keuangan dapat dengan mudah mengontrol ataupun memberikan pinjaman kepada nasabah. Di dalam ekonomi syariah, lembaga keuangan memiliki sistem bagi hasil yang dilakukan dengan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Terdapat mekanisme perhitungan sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam ekonomi syariah, salah satunya sistem *profit sharing* yang memiliki akad atau bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil salah satunya adalah akad Mudharabah. Dalam pelaksanaan akad Mudharabah, nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari pemberi dana, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan lembaga keuangan syariah dari pengimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. Tabungan Mudharabah yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
2. Deposito Mudharabah yaitu merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
3. Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip mudharabah di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Ada beberapa lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah Misykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) yang berlandaskan ekonomi syariah. Di Misykat juga menerapkan sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah yaitu kesepakatan dengan pembagian keuntungan bersih tanpa mencampuri modal yang diberikan atau yang sering disebut *profit sharing* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penerima dana tidak terberatkan dengan adanya sistem ini karena terbebas dari bunga. Misykat memberikan dana kepada orang-orang yang kurang mampu untuk pemberian dana modal usaha yang diharuskan membuka usaha secara mandiri dan mengikuti pembekalan yang diberikan Misykat. Bagi penerima dana tersebut diharuskan untuk melaporkan aktivitasnya ke lembaga tersebut. Dengan begitu, para penerima dana harus memiliki literasi keuangan yang baik dan benar agar dapat melaporkan aktivitas keuangannya. Pemahaman akan literasi keuangan ini sangat diperlukan bagi setiap individu agar dapat mengelola dan merencanakan keuangannya. Begitu pula bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM wajib mengerti tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan sehingga kelak dapat bermanfaat dalam proses pengembangan usahanya, oleh karena itu literasi keuangan sudah menjadi hal mutlak yang harus dipahami oleh pelaku UMKM (Cahyono, 2012).

Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2017, penulis telah melakukan kegiatan magang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat yang berkantor di Gegerkalong, Bandung dan penulis ditempatkan di bidang pendampingan UMKM. Pendampingan dilakukan di Wilayah Tegallega dan Mohamad Toha yang merupakan UMKM binaan dari KSU Misykat. Dalam menjalankan usahanya, mayoritas UMKM ini tidak memisahkan keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Hal ini yang menjadi perhatian penulis untuk dijadikan bahan penelitian karena berdasarkan penelitian dari Dahmen dan Rodriguez (2014) juga menyatakan bahwa pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami pertumbuhan bisnis.

Pendampingan ini sendiri dilakukan untuk memberdayakan para pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan selama pendampingan, para pelaku UMKM diberikan khasanah keilmuan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melakukan usahanya maupun khasanah keagamaan yang diberikan langsung oleh petugas dari KSU Misykat yang memberi materi dakwah tentang Agama Islam dan

pengajian rutin yang dilakukan setiap minggu sekali yang berguna memperkuat ilmu keagamaan mereka sehingga secara tidak langsung dengan diberikannya khasanah kelimuan dan keagamaan mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab secara duniawi tetapi pelaku UMKM juga memiliki tanggung jawab secara spiritual. Oleh karena itu, pemberian materi ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja UMKM tersebut.

Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatoki (2014), literasi keuangan berpengaruh secara positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga perusahaan serta keberlangsungan perusahaan. Pernyataan tersebut membuat literasi keuangan menjadi hal yang sangat diperlukan oleh setiap organisasi bisnis, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mengembangkan kemampuan bersaing dalam persaingan global.

Diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan cara memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan keuangan usaha dapat berkembang dengan baik (Aribawa, 2016). Dahmen dan Rodriguez (2014) juga menyatakan bahwa diperlukan pemahaman tingkat literasi keuangan bagi pelaku usaha terutama untuk penyusunan laporan keuangan usahanya guna untuk dilakukan mencari pendanaan. Anggraeni (2015) literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha. Kemampuan mengelola keuangan pemilik usaha memang sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan kelangsungan usahanya. Dalam penelitiannya, Wise (2013) menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan menyebabkan lebih sering individu untuk membuat laporan keuangan usaha mereka. Penelitian ini menemukan bahwa pengusaha yang lebih sering menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik akan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dari pembayaran pinjaman dan untuk kelangsungan usahanya akan lebih tinggi. Namun, Eke dan Raath (2013) menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM. Olawale dan Garwe (2010) dalam penelitiannya di sebuah UKM di Afrika menemukan bahwa pemahaman literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan UKM dan kinerja UKM.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis melihat adanya peluang riset untuk meneliti kondisi internal para UMKM dimana salah satunya adalah literasi keuangan. Sehingga, penulis tertarik untuk menjadikan variabel ini sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana variable diatas berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui penyebaran kuisisioner terhadap para pelaku UMKM. Penelitian ini juga dapat mendukung program pemberdayaan UMKM yang diharapkan bisa meningkatkan kemandirian UMKM dalam meningkatkan taraf hidup mereka baik secara ekonomi dan sosial. Hal-hal diatas menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (Studi pada UMKM Binaan KSU Misykat Wilayah Tegallega dan Mohamad Toha)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi keuangan pada UMKM binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017?
2. Bagaimana kinerja UMKM pada binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM pada UMKM binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui literasi keuangan pada UMKM binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kinerja UMKM pada binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM pada UMKM binaan KSU Misykat di Wilayah Tegallega dan Mohammad Toha tahun 2017.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat berguna pada pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru dengan memahami literasi keuangan yang baik dalam pengambilan keputusan ataupun dalam mengelola keuangan pribadi.
- b. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui beberapa hal baru seperti adanya literasi keuangan dan pentingnya adanya pengelolaan keuangan dalam bisnis. Selain itu, diharapkan adanya tindak lanjut dalam bentuk pendidikan dan latihan mengenai literasi keuangan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan penelitian ini memberikan informasi dan membantu penelitian selanjutnya mengkaji lebih dalam mengenai literasi keuangan dengan batasan yang lebih luas.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi industri jasa keuangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para pelaku industri jasa semakin meningkatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan hubungan dengan para dosen di Indoensia untuk selalu mengedukasi mahasiswa dan masyarakat disekitarnya.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran di bidang keuangan dan ekonomi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memberikan arah serta gambaran materi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menguraikan mengenai karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.